

ANALISIS PENGETASAN KEMISKINAN DI KOTA PALEMBANG

Yesi Triani

Magister Ekonomi Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: 19106022023@radenfatah.ac.id

Maya Panorama

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: Maya-Pnorama@yahoo.com

Rinol Sumantri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: rinolsumantriuin@radenfatah.ac.id

Abstract

This study aims to determine poverty reduction in the city of Palembang. The data used are time series data in 2018-2019. Poverty is a condition where there is an inability to meet basic needs such as food, clothing, shelter, education, and health. The type of data used is secondary data and primary data. Secondary data sources were collected from several authorized agencies and related to poverty alleviation programs such as the Social Service, The Central Bureau of Statistics of Indonesia and other relevant secondary data sources. Whereas primary data is directly through in-depth interviews (depth interviews), as well as stakeholders in the determined research areas. Changes in structure as an operational step and humans as targets, the most appropriate poverty reduction strategy is community empowerment. Poverty reduction based on community empowerment focuses on two main scopes, namely: the scope of the area and the scope of the material. The scope of the area is the Palembang City government and other supporting agencies in the government environment related to this study, as well as other regions that cover various areas that are poor areas in various regions in the City of Palembang. The scope of the material includes empirical studies in the form of macroeconomic analysis and poverty reduction analysis, as well as theoretical studies on community empowerment.

Keywords: *Poverty Reduction, Community Empowerment*

Abstrak

Penelitian ini untuk mengetahui pengentasa kemiskinan di Kota Palembang, Data yang digunakan adalah data runutan waktu pada tahun 2018-2019. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Sumber data sekunder berasal dari beberapa instansi yang berwenang dan berkaitan dengan program pengentasan kemiskinan seperti Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik dan sumber-sumber data sekunder lainnya yang berkaitan. Sedangkan data primer langsung melalui wawancara secara mendalam (*depth interview*), serta *stakeholder* di wilayah penelitian yang telah ditetapkan. Perubahan struktur sebagai langkah operasional dan manusia sebagai sasaran, maka strategi penanggulangan kemiskinan yang palingtepat adalah pemberdayaan masyarakat. Pengentasan kemiskinan berbasis

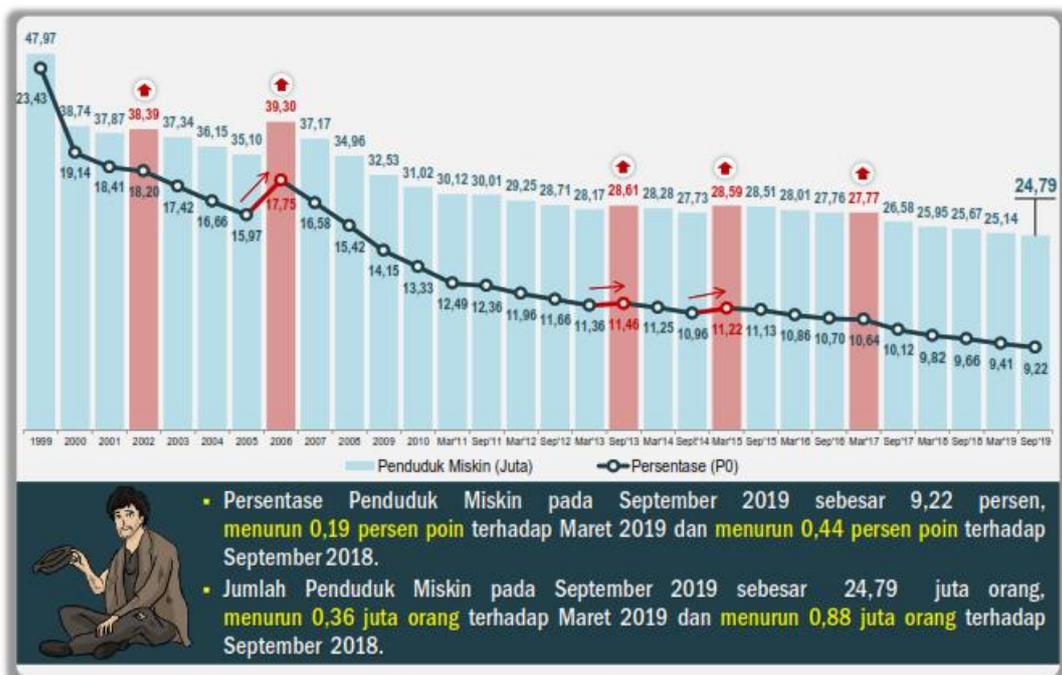
pemberdayaan masyarakat ini berfokus pada dua lingkup utama, yaitu: ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Ruang lingkup wilayah adalah pemerintah Kota Palembang dan instansi pendukung lainnya di lingkungan pemerintah yang berkaitan dengan kajian ini, serta wilayah lain yang meliputi berbagai daerah yang menjadi kantong kemiskinan di berbagai daerah di Kota Palembang. Ruang lingkup materi, meliputi kajian empirik berupa analisis ekonomi makro dan analisis pengentasan kemiskinan, serta kajian teori tentang pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: Pengentasan Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat

PENDAHULUAN

Latar belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang menjadi prioritas untuk diselesaikan oleh pada setiap periode pemerintahan di Indonesia. Berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilakukan baik oleh pemerintahan yang lalu maupun yang sekarang, mulai dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sekolah gratis, dan berobat gratis di beberapa provinsi di Indonesia hingga pada pemberian berbagai skim subsidi bagi masyarakat, namun program-program tersebut belum sepenuhnya mampu mensejahterakan masyarakat miskin di Indonesia. Berikut ini data tingkat kemiskinan di Indonesia (Septa, Dkk., 2019).



Gambar 1. Persentase Tingkat Penduduk Miskin Di Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik (20-12-2019)

Nomor Katalog: 3205022

Nomor Publikasi: 04340.1902

Kemiskinan adalah masalah bagi negara di dunia terutama pada negara yang sedang berkembang. Bagi Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang yang ada di ASEAN masalah kemiskinan bukan merupakan hal yang baru hampir instrument pembangunan.

Kemiskinan adalah terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi, terbatasnya akses terhadap air bersih, lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah, memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam lemahnya jaminan rasa aman, lemahnya partisipasi dan besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga.

Kemiskinan memang persoalan yang kompleks, karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi. Tetapi, berkaitan pula dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan serta ketidakberdayaannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah (Suhandi, 2018).

Sesuai dengan cita-cita pembangunan nasional yaitu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka kemiskinan adalah masalah yang harus diatasi. Kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan sudah seharusnya didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi kemiskinan tersebut. Faktor-faktor penyebab kemiskinan (determinan'' kemiskinan) setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Studi Bank Dunia memberikan sebuah pemahaman baru dalam melihat persoalan kemiskinan, pendekatan langsung kemasyarakat miskin dan mendengar sendiri dari mereka persoalan-persoalan yang dihadapi memberikan pelajaran tersendiri dalam mengambil kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan (Kurniawan, 2017).

Pertumbuhan ekonomi yang cepat oleh negara-negara di dunia menjadi salah satu syarat utama untuk mengentaskan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi sendiri tidak akan cukup untuk mengentaskan kemiskinan, namun pertumbuhan ekonomi adalah merupakan syarat yang dibutuhkan. Meski dibutuhkan, seringkali pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan bermanfaat bagi masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan adanya pemerataan pada kesejahteraan masyarakat.

Banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan baik kebijakan dalam skala mikro yaitu dengan membuat program-program yang bersentuhan langsung kepada masyarakat maupun program yang bersifat tidak langsung yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/Kota. Semua kebijakan tersebut akan memberikan dampak makro terhadap pembangunan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat atau sebaliknya kebijakan secara makro akan memberikan dampak kepada skala mikro (Kembar, 2013).

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, Penulis ingin menggali lebih lanjut bagaimana strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Palembang. Untuk itu dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian adalah apa saja strategi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di kota Palembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di kota Palembang.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Kemiskinan merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak sejak umat manusia ada. Sampai saat ini belum ditemukan suatu rumusan maupun formula penanganan kemiskinan yang dianggap jitu dan sempurna sehingga harus terus menerus dikembangkan. Ada banyak definisi dan konsep tentang kemiskinan. World Bank (2002) membagi dimensi kemiskinan kedalam empat hal pokok, yaitu *lack of opportunity*, *low capabilities*, *low level security*, dan *low capacity*. Kemiskinan dikaitkan juga dengan keterbatasan hak-hak sosial, ekonomi, dan politik sehingga menyebabkan kerentanan, keterpurukan, dan ketidakberdayaan.

Menurut Jeffrey Sachs (2005, dalam Depdagri & LAN, 2007) terdapat enam modal utama yang tidak dimiliki oleh masyarakat miskin. *Pertama*, modal manusia yang mencakup kesehatan, nutrisi, keahlian yang dibutuhkan untuk menjadi produktif dalam ekonomi. *Kedua*, modal usaha yang meliputi mesin, fasilitas motor elektronik yang dipergunakan dalam bidang pertanian, industri termasuk industri jasa. *Ketiga*, infrastruktur seperti jalan, listrik, air, sanitasi dan sistem telekomunikasi. *Keempat*, modal yang berkaitan dengan alam yaitu tanah yang subur, keanekaragaman hayati, ekosistem yang berfungsi dengan baik yang dapat menyediakan pelayanan lingkungan yang dibutuhkan oleh manusia. *Kelima*, modal institusi publik, seperti peraturan-peraturan perdagangan komersial, sistem hukum, pelayanan dan kebijakan pemerintah yang mengatur pembagian tenaga kerja yang damai dan adil. *Keenam*, modal pengetahuan yang terdiri atas ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas dalam menghasilkan produk serta meningkatkan modal fisik dan alam.

Terdapat banyak sekali teori dalam memahami kemiskinan. Bila dipetakan ada dua paradigma atau *grand theory* mengenai kemiskinan yaitu paradigma liberal dan demokrasi sosial kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan kronis. maka, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan baik langsung maupun tidak langsung cukup banyak mulai dari pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, tingkat upah, jenis pekerjaan dan jumlah jam kerja, kesempatan kerja (termasuk jenis pekerjaan yang tersedia), inflasi, jumlah anggota rumah tangga, fasilitas kesehatan, konsumsi rumah tangga, sumber air bersih, transportasi, kepemilikan aset lahan pertanian, pendidikan dan jumlah tahun bersekolah seluruh anggota keluarga, akses permodalan, dan lokasi wilayah tempat tinggal penduduk dengan pusat pertumbuhan ekonomi yang kalau diamati, sebagian besar dari faktor-faktor tersebut juga mempengaruhi satu sama lain karena sangat kompleks dan kronis, maka cara pengentasan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat

temporer. Sejumlah variabel dapat dipakai untuk melacak persoalan kemiskinan dan dari variabel ini dihasilkan serangkaian strategi dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkesinambungan. Dari dimensi pendidikan, pendidikan yang rendah dipandang sebagai penyebab kemiskinan. Dari dimensi kesehatan, rendahnya mutu kesehatan masyarakat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dari dimensi ekonomi, kepemilikan alat-alat produktif yang terbatas, penguasaan teknologi dan kurangnya keterampilan dilihat sebagai alasan mendasar mengapa terjadi kemiskinan (Setiyawan, Risky Dwi, dkk., 2016).

Kemiskinan secara konseptual dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan *absolut*, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Sedangkan standar penilaian kemiskinan secara *absolut* merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan (Kuncoro, 2004).

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standart kebutuhan minimum, baik untuk makan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya. Dari segi ekonomi, kemiskinan adalah kondisi yang ditandai oleh serba kekurangan: kekurangan pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dari segi politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan. Dalam buku Suharto (2005) konteks politik Friedman mendefinisikan kemiskinan dalam kaitannya dengan ketidaksamaan kesempatan dalam mengakumulasikan basis kekuasaan sosial yang meliputi:

- a) Modal produktif atau aset (tanah, perumahan, alat produksi, kesehatan)
- b) Sumber keuangan (pekerjaan dan kredit)
- c) Organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, parpol, organisasi sosial),
- d) Jaringan social untuk memperoleh pekerjaan, barang, dan jasa,
- e) Pengetahuan dan ketrampilan, dan;
- f) Informasi yang berguna untuk kemajuan hidup

Dari segi sosial psikologis, kemiskinan adalah kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang

yang berada di bawah garis kemiskinan merupakan dua masalah besar di banyak negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya meliputi: *Pertama*, gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. *Kedua*, gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. *Ketiga*, gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia (Solikatur, 2004).

1. Teori Lingkaran Kemiskinan

Data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Modul Konsumsi dan Pengeluaran menggambarkan Lingkaran kemiskinan dapat direpresentasikan sebagai pembentukan modal rendah yaitu investasi diakibatkan oleh banyak faktor-faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Ketika tingkat pembentukan modal rendah atau di notasikan sebagai investasi secara teori akan berdampak kepada penurunan tingkat produktivitas. Dalam kondisi perekonomian domestik yang tingkat produktivitas rendah akan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan juga ada korelasi yang sangat kuat ketika produktivitas rendah secara teorinya akan berdampak kepada pendapatan penduduk atau masyarakat yang hubungannya secara negatif karena adanya penurunan pendapatan masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya tingkat produktivitas penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

2. Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

1. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)
2. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Rumus Penghitungan:

$$\mathbf{GK = GKM + GKNM}$$

Diketahui:

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

Teknik Penghitungan GKM

- a) Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (*reference populaion*) yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasar GK periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
- b) Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah:

$$GKM^*_{jp} = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

Dimana :

- GKM^*_{jp} : Gris Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori) provinsi p .
 P_{jkp} : Rata-rata harga komoditi k di daerah j dan provinsi p .
 Q_{jkp} : Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p .
 V_{jkp} : Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p .
 j : Daerah (perkotaan atau pedesaan).
 p : Provinsi ke- p .

Selanjutnya GKM j tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga:

$$\overline{HK}_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} Y_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jkp}}$$

Dimana :

- K_{jkp} : Kalori dari komoditi k di daerah j di provinsi p
 \overline{HK}_{jp} : Harga rata-rata kalori di daerah j di provinsi p

- c) Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan. Nilai kebutuhan minimum perkomoditi /sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKP 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{kj} V_{kjp}$$

$GKNM_{jp}$: Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non-makanan daerah j dan provinsi p

V_{kjp} : Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah j dan provinsi p

r_{kj} : Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan k menurut daerah (hasil SPKKD 2004) dan daerah j

k : Jenis komoditi non-makanan terpilih

j : Daerah (Perkotaan atau perdesaan)

p : Provinsi ke- p

3. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Rumus Penghitungan:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana:

α = 2

z = Garis kemiskinan.

Y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$.

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = Jumlah penduduk

4. Faktor- Faktor yang Menyebabkan Kemiskinan

Nasikun menyoroti beberapa sumberdan penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

1. *Policy Induces Processes*. Proses kemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan (*induced of policy*) diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi realitasnya justru melestarikan.
2. *Sosio Economic Dualism*. Yakni Negara eks koloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang subur dikuasai para petani skala besar dan berorientasi ekspor.

3. *Population Growth*. Perspektif yang didasari oleh teori Malthus bahwa penambahan penduduk seperti deret ukur, sedang penambahan pangan seperti deret hitung.
4. *Resources Management and The Environment*. Adanya unsur *miss management* sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang dan dapat menurunkan produktivitas.
5. *Natural Cycles and Processes*. Yakni kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalkan yang tinggal di lahan kritis, dimana lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir, namun jika musim kemarau akan kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus menerus.
6. *The Marginalitation of Woman*. Adalah peminggiran kaum perempuan karena masih dianggap sebagai golongan kelas dua sehingga akses dan penghargaan lebih rendah ketimbang laki-laki.
7. *Culture and Etnik Factor*. Bekerjanya faktor budaya dan etnik yang eksis memelihara kemiskinan. Misalnya pola hidup yang konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen, serta adat istiadat saat upacara adat yang dapat menyedot biaya mahal.
8. *Exploitative Intermediation*. Keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir.
9. *Internal Political Fragmentation and Civil Stratife*. Yakni suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dan dapat menjadi penyebab kemiskinan. Dan yang terakhir adalah:
10. *International Processes*. Yakni bekerjanya sistem-sistem internasional seperti kolonialisme dan kapitalisme yang membuat banyak negara menjadi miskin.

Menurut pandangan secara umum, kemiskinan jika dilihat dari faktor penyebabnya, maka dibedakan atas: kemiskinan kultural, natural dan struktural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti: malas, tidak disiplin, boros dan lain sebagainya. Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti: karena cacat, sakit, lanjut usia, dan karena bencana alam. Sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia, seperti: distribusi aset produktif yang tidak merata, kebijakan ekonomi yang tidak adil, korupsi dan kolusi, serta tatanan perekonomian yang cenderung menguntungkan kelompok tertentu.

Teori yang berbasis pada *sosioantropologis* melihat kemiskinan sebagai akibat faktor kultural yang menekankan adanya pengaruh budaya yang cenderung melanggengkan kemiskinan. Sedangkan yang berbasis ekonomi melihat kemiskinan sebagai akibat faktor natural seperti rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan sumber daya alam, dan faktor struktural seperti kesenjangan kepemilikan faktor produksi, rendahnya pembentukan modal masyarakat dan rendahnya perangsang untuk penanaman modal (Murdiansyah, 2014).

Penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Namun lebih tepatnya terletak pada perbedaan kualitas sumber daya manusia dan perbedaan akses modal.

Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Penyebab sub-budaya (*subcultural*), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar

Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Karena ciri dan keadaan masyarakat dalam suatu daerah sangat beragam (berbeda) ditambah dengan kemajuan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang masih rendah.

Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur social dan kebijakan pemerintah. Kebijakan dalam negeri seringkali dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri atau internasional antara lain dari segi pendanaan dan yang paling penting adalah Ketidakmerataannya Distribusi Pendapatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dengan menggunakan perspektif yang lebih luas, David Cox membagi kemiskinan ke dalam beberapa dimensi:

- 1) Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi.
- 2) Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan.
- 3) Kemiskinan sosila
- 4) Kemiskinan konsekuensial

Kebijakan Dasar Pengentasan Kemiskinan

Pemerintah mempunyai peranan besar dalam usaha menanggulangi kemiskinan ditengah air. Untuk itu diperlukan suatu strategi dan bentuk intervensi yang tepat, dalam *articost effectiveness*-nya tinggi. Ada tiga pilar utama strategi pengurangan kemiskinan, yakni (1) Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan yang pro kemiskinan, (2) Pemerintahan yang baik, (3) Pembangunan sosial. (Prayitno, 1996)

Tambunan, dkk. (2006) Untuk mendukung strategi tersebut diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan, langkah-langkah penanggulangan kemiskinan senantiasa perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

Program penanggulangan kemiskinan hanya berjalan baik dan efektif apabila ada suasana tentram dan stabil. Kestabilan mutlak diperlukan untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan karena pada dasarnya upaya penanggulangan kemiskinan adalah upaya untuk menciptakan ketentramandan kestabilan politik, ekonomi, sosial dan politik.

Program penganggulan kemiskinan dapat berjalan efektif apabila pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan. Keluarga kecil yang sejahtera adalah salah satu dari faktor yang kondusif untuk mencapai sasaran menganggulan kemiskinan.

1. Program penanggulangan kemiskinan harus dikaitkan dengan lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang tetap lestari dan terjaga dengan baik memungkinkan distribusi kesejahteraan antar warga masyarakat secara merata.
2. Program penanggulangan kemiskinan harus merupakan program yang berkelanjutan, yaitu program yang dapat terus–menerus berjalan dan dapat mandiri. Hal ini berarti program penanggulangan kemiskinan harus dilandaskan pada peningkatan kemampuan masyarakat miskin untuk melakukan kegiatan produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar dari suatu kegiatan. Upaya meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap pempat hal, yaitu:
 - a. Akses terhadap sumber daya.
 - b. Akses terhadap teknologi, yaitu suatu kegiatan dengan cara dan alat yang lebih baik dan lebih efisien.
 - c. Akses terhadap pasar. Produk yang dihasilkan harus dapat dijual untuk mendapatkan nilai tambah. Ini berarti bahwa penyediaan sarana produksi dan peningkatan keterampilan harus diimbangi dengan tersedianya pasar secara terus- menerus.
 - d. Akses terhadap sumber pembiayaan
3. Pendelegasian wewenang atau desentralisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap program penanggulangan kemiskinan yang diupayakan pada tingkatan pemerintahan serendah mungkin. Pendelegasian wewenang dilakukan dengan meningkatkan kemampuan aparat dan masyarakat di daerah itu sendiri. Dalam hubungan ini, pemerintah daerah harus mengambil peranan yang lebih besar lagi karena mereka yang paling mengetahui mengenai kondisi dan kebutuhan penduduk di kantong-kantong kemiskinan didaerahnya. Semakin dekat pelaksana proyek dan kegiatan dengan kelompok sasaran, maka akan semakin efektif.
4. Tekanan yang paling utama seyogyanya diberikan pada perbaikan pelakunya, terutama manusianya (*invest in people*) menyangkut aspek pendidikan dan kesehatan. Keduanya berkaitan dengan peningkatan akses secara merata dan sekaligus mutu yang lebih baik.
5. Pelayanan bagi orang jompo, penderita cacat, yatim piatu, dan kelompok masyarakat lain yang memerlukan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya menanggulangi kemiskinan. Program ini bersifat khusus dan dilaksanakan secara selektif. Langkah yang diperlukan adalah meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan jangkauan program tersebut. Searah dengan itu, pengembangan sistem jaminan sosial secara bertahap perlu terus ditingkatkan (Murdiayah, 2014).

Model Solusi Pengentasan Kemiskinan

Pengalaman di negara-negara Asia menunjukkan bahwa model mobilisasi perekonomian pedesaan untuk memerangi kemiskinan, yaitu: *Pertama*, mendasarkan pada mobilitas tenaga kerja agar terjadi pembentukan modal di pedesaan. Tenaga kerja yang masih belum didayagunakan pada rumahtangga petani kecil dan gurem merupakan sumber daya yang tersembunyi dan potensi tabungan. Alternatif cara untuk memobilisasi tenaga kerja dan tabungan pedesaan diantaranya adalah: *Pertama*, menggunakan pajak langsung atas tanah, seperti yang dilakukan di Jepang. *Kedua*, dilakukan dengan menyusun kerangka kelembagaan di pedesaan yang memungkinkan tenaga kerja yang belum didayagunakan untuk pemupukan modal tanpa perlu menambah upah. Ini persis yang dilakukan Cina yang menerapkan sistem kerjasama kelompok dan *brigades* ditingkat daerah yang paling rendah (*communes*).

Dengan metode ini ternyata memungkinkan adanya kenaikan yang substansial dalam intensitas tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja. Model *kedua*, menitikberatkan pada transfer daya dari pertanian ke industri melalui mekanisme pasar. Ide bahwa penawaran tenaga kerja yang tidak terbatas dari rumah tangga petani kecil dapat meningkatkan tabungan dan formasi modal lewat proses pasar. Model *ketiga*, menyoroti pesatnya pertumbuhan dalam sektor pertanian yang dibuka dengan kemajuan teknologi dan kemungkinan sektor yang memimpin (Moleong, Lexy, 2007). Model ini dikenal dengan nama Model Pertumbuhan Berbasis Teknologi, atau *RuralLed Development*. Model *keempat*, menyoroti dimensi spasial dalam menanggulangi kemiskinan. Kemiskinan bisa diatasi dengan cara kemudahan dalam mengakses dua bidang, yaitu: 1). Bidang ekonomi dan 2). Bidang sosial. (Kuncoro, 2000)

5. Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Masalah kemiskinan menyangkut dengan kesejahteraan sosial. Maka, berdasarkan analisis dan kajian kesejahteraan sosial, perlu adanya usaha-usaha kesejahteraan sosial dalam mengentaskan kemiskinan tersebut. Namun dalam ranah bahasan ini, kebijakan pengentasan kemiskinan selama ini masih didesain dengan corak sentralistis oleh pemerintah pusat, khususnya yang diwakili oleh Bappenas. Mekanismenya, Bappenas merancang program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan dukungan alokasi dan distribusi anggaran APBN. Pada masa otonomi sekarang, pemerintah daerah mengalami disfungsi dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan. (Kuncoro, 2003)

Program yang dikenal oleh daerah hampir semuanya dari pusat dan disertai dengan kriteria dari pusat. Sedangkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial, yang dijadikan landasan dalam perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial, secara nyata telah mencantumkan istilah pemberdayaan masyarakat sebagai strategi dalam pembangunan, seperti yang tercantum sebagai berikut: Strategi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran serta kebijakanyang telah ditetapkan yaitu:

- a. *Pemberdayaan*: peningkatan *profesionalisme* dan kinerja aparatur dan pelaku pembangunan kesejahteraan sosial untuk memberikan kepercayaan dan peluang

kepada masyarakat, Organisasi Sosial, LSM, dunia usaha dan penyandang masalah sosial dalam mencegah dan mengatasi masalah yang ada di lingkungannya serta merealisasikan aspirasi dan harapan mereka dalam mewujudkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosialnya

- b. *Kemitraan*: kerjasama, kepedulian, kesetaraan, kebersamaan, kolaborasi dan pelaksanaan jaringan kerja yang menumbuh kembangkan kemanfaatan timbal balik antara pihak-pihak yang bermitra dan mengoptimalkan pelayanan-pelayanan yang bersifat terpadu.
3. Prakarsa, peranan dan keterlibatan semua pihak pelaku pembangunan dan penerima pelayanan, lingkungan sosial dan penyedia pelayanan dalam pengambilan keputusan, perumusan rencana, pelaksanaan kegiatan dan pemantauan pelaksanaan serta melakukan pilihan terbaik untuk peningkatan kesejahteraan sosial. Namun demikian, makna pemberdayaan dan implikasinya terhadap proses pelaksanaan program yang menggunakan strategi pemberdayaan belum sepenuhnya dipahami. Gambaran tentang program pemberdayaan masyarakat, khususnya menyangkut pengelolaan. (Ismawan, 2000)

Pada era sentralisasi sendiri, pemberdayaan biasanya didistorsikan pemaknaannya menjadi lebih sempit, yakni sebagai upaya mendorong masyarakat untuk menggunakan sumber-sumber yang disediakan oleh pemerintah dalam konteks usaha ekonomi, dan juga bertendensi sebagai suatu usaha untuk menarik simpati masyarakat bagi kepentingan politik.

Dengan demikian, pemberdayaan juga dapat dikatakan masih di monopoli dan direduksi pemaknaannya serta orientasinya sebagai perspektif politik dan ekonomi daripada perspektif sosial dan budaya. Gambarannya dapat dilihat dari adanya usaha untuk memobilisasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang datang dari atas untuk kepentingan politik tertentu dan mempertahankan keberhasilan pertumbuhan ekonomi dengan kurang memberikan peluang agar inisiatif tumbuh dari masyarakat, khususnya aksesibilitas masyarakat terhadap sumber kehidupan dan pengambilan keputusan. Maka, sebenarnya keberhasilan program pengentasan kemiskinan adalah terletak pada pengidentifikasian secara akurat terhadap kelompok dan wilayah yang ditargetkan. (Remi, 2002)

Sedangkan kritik yang dilontarkan terhadap program pengentasan kemiskinan antara lain mengenai penetapan sasaran, yakni dalam penentuan penduduk yang benar-benar miskin dan membutuhkan bantuan dan pendekatan yang hendak dilakukan adalah hendaknya berdasarkan profil kemiskinan dan *people driven*. Makna dari pernyataan ini bahwa rakyat adalah aktor utama dalam setiap formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan politis (*bottom up*). (Mardiasmo, 2002)

Dalam Kuncoro (2004) Upaya penanggulangan kemiskinan yang lalu perlu dikoreksi secara mendasar diantaranya:

1. Kebijakan yang terpusat dan seragam
2. Memposisikan masyarakat sebagai obyek dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan

3. Asumsi permasalahan dan penanggulangan kemiskinanyang sering dipandang sama (*one-fit-forall*)
4. Kurang memperhatikan keragaman budaya
5. Kelompok sasaran antara program yang satu dan program lainnya seringkali tumpang tindih
6. Kebijakan yang bersifat sektoral dan daerah kurang diberdayakan dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian pada kajian ini adalah analisis pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di kota Palembang. Kegiatan analisis pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat ini berfokus pada dua lingkup utama, yaitu: ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Ruang lingkup wilayah adalah pemerintah kota Palembang dan instansi pendukung lainnya di lingkungan pemerintah kota Palembang yang berkaitan dengan kajian ini, serta wilayah lain yang meliputi berbagai daerah yang menjadi kantong kemiskinan di berbagai daerah di Kota Palembang. Ruang lingkup materi, meliputi kajian empirik berupa analisis ekonomi makro dan analisis pengentasan kemiskinan, serta kajian teori tentang pemberdayaan masyarakat.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder berasal dari beberapa instansi yang berwenang dan berkaitan dengan program pengentasan kemiskinan seperti Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik dan sumber-sumber data sekunder lainnya yang berkaitan.

Analisis data dilakukan secara mendalam guna menjawab beberapa tujuan dalam penelitian ini seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Proses analisis data mengacu pada *interactive model of analysis* yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Analisis data model interaktif terdiri dari tiga komponen utama analisis yang dilaksanakan secara simultan sejak atau bersamaan dengan proses pengumpulan data. Komponen-komponen tersebut adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Salah satu dari penyebab kemiskinan adalah terbatasnya akses untuk memperoleh modal, baik itu modal usaha, maupun modal sosial dan politik. Penduduk miskin kota yang mayoritas merupakan masyarakat miskin memiliki keterbatasan dalam memperoleh pemodalannya tersebut. Pinjaman modal dari perbankan sulit didapat oleh para penduduk miskin, hal itu dikarenakan tidak adanya harta benda lain (selain uang) yang bisa mereka jadikan tanggungan di bank sehingga masyarakat miskin tidak mendapatkan pinjaman modal dari perbankan menjadikan mereka lebih memilih meminjam kepada renternir untuk mendapatkan modal. Dari 107 Kelurahan di kota Palembang belum ada lembaga simpan

pinjam yang mendapatkan dana tambahan simpan pinjam bagi warga miskin yang di kelola Unit Pengelola Keuangan Program Pemberdayaan Masyarakat.

Lingkaran setan yang melahirkan jebakan ketidakberdayaan inilah yang menjadikan alasan penting mengapa lembaga keuangan mikro yang menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan masyarakat miskin menempati tempat yang sangat strategis. Pada awalnya, konsep pembiayaan mikro (*microfinance*) lahir sebagai suatu terobosan bagi penyediaan jasa keuangan kepada masyarakat berpendapatan rendah yang tidak memiliki akses ke sistem keuangan modern. Keberadaan lembaga keuangan mikro untuk mengatasi hal itu sangat berarti bagi masyarakat miskin khususnya kemiskinan. Sejak jaman dahulu, keberadaan lembaga keuangan mikro menjadi alternatif bagi kelompok berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan dana mereka. Lembaga Keuangan Mikro terdiri dari berbagai macam jenis yang merupakan lembaga perkereditan rakyat. Tujuan dari pembangunan lembaga perkreditan rakyat tersebut adalah untuk menyediakan kemudahan permodalan bagi masyarakat berpenghasilan rendah guna mengembangkan usaha dan kemampuannya.

Sebagai bagian dari permasalahan pembangunan, sudah sewajarnya jika strategi penanggulangan kemiskinan dilandasi atas pemahaman terhadap konsep pembangunan. Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu perubahan struktur yang dimulai dari upaya memperbaiki kapabilitas manusia, sehingga memiliki peluang memasuki kesempatan kerja dan berusaha, memperoleh peningkatan pendapatan, hingga akhirnya mampu secara mandiri melakukan perlindungan sosial yang merupakan wujud nyata keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial.

Dengan perubahan struktur sebagai langkah operasional dan manusia sebagai sasaran, maka strategi penanggulangan kemiskinan yang paling tepat adalah pemberdayaan masyarakat. Makna pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang di miliki dan yang tersedia di lingkungan sekitarnya untuk meningkatkan kesejahteraan.

Penanggulangan kemiskinan melalui strategi pemberdayaan secara terfokus sekaligus dapat menghindari penggunaan dana pemerintah untuk kegiatan yang tidak produktif. Sasaran yang menjadi focus penanggulangan kemiskinan melalui strategi pemberdayaan adalah penduduk miskin yang berusia produktif, yaitu berkisar antara 15 tahun hingga 55 tahun. Penduduk miskin pada kisaran ini yang sehat secara jasmani maupun rohani merupakan sumber daya manusia yang memiliki potensi besar untuk menjadi pelaku aktif dalam pembangunan. Disamping itu, penduduk berusia produktif juga merupakan individu yang berada pada fase rumah tangga, sehingga apabila tidak ditangani dengan baik, dapat menciptakan penduduk miskin baru (Sudomingrat, 2003: 6-7).

Pemerintah menjalankan fungsi sebagai fasilitator, sedangkan masyarakat miskin ditempatkan sebagai pelaku usaha berskala mikro. Adapun perbankan dan dunia usaha diharapkan dapat menyediakan pembiayaan serta akses pemasaran.

Berikut ada 16 cara yang dapat dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan tersebut yaitu:

1. Hapuskan larangan impor beras.
2. Lakukan investasi di bidang pendidikan dengan fokus pada perbaikan akses dan keterjangkauan sekolah menengah serta pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin, sambil terus meningkatkan mutu dan efisiensi sekolah dasar.
3. Lakukan investasi di bidang kesehatan dengan fokus pada perbaikan mutu layanan kesehatan dasar (oleh pemerintah dan swasta) dan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan.
4. Suatu upaya khusus diperlukan untuk menangani angka kematian ibu yang sangat tinggi di Indonesia.
5. Perbaiki mutu air bagi masyarakat miskin dengan menggunakan strategi berbeda antara daerah pedesaan dengan perkotaan.
6. Tangani krisis sanitasi yang dihadapi Indonesia dan masyarakat miskinnya.
7. Luncurkan program berskala besar untuk melakukan investasi pembangunan jalan desa.
8. Perluas (sampai tingkat nasional) pendekatan pembangunan berbasis masyarakat (CDD) Indonesia yang sukses.
9. Pengembangan secara utuh sistem jaminan sosial komprehensif yang mampu menangani risiko dan kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat miskin dan hampir miskin.
10. Revitalisasi pertanian melalui investasi di bidang infrastruktur dan membangun kembali riset dan penyuluhan.
11. Memperlancar sertifikasi tanah dan memanfaatkan kembali tanah gundul dan tidak subur untuk penggunaan yang produktif.
12. Membuat peraturan ketenagakerjaan yang lebih fleksibel.
13. Perluas jangkauan layanan keuangan bagi masyarakat miskin dan tingkatkan akses usaha mikro dan kecil ke pinjaman komersial.
14. Perbaiki fokus kepada kemiskinan dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat nasional untuk penyediaan layanan.
15. Jalankan program pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan.
16. Menganggarkan dan melaksanakan program pengentasan kemiskinan.

Perkuat monitoring dan kajian terhadap program kemiskinan. Banyak pihak meyakini lembaga keuangan mikro sebagai suatu alat pembangunan yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan karena layanan keuangan memungkinkan orang kecil dan rumah tangga berpenghasilan rendah untuk memanfaatkan peluang ekonomi, membangun aset dan mengurangi kerentanan terhadap goncangan eksternal. Lembaga keuangan mikro menjadi alat yang cukup penting untuk mewujudkan pembangunan dalam tiga hal sekaligus, yaitu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengentaskan kemiskinan (Hendayana, 2007: 14).

Untuk itu di kelurahan kelurahan di kota Palembang di bentuklah Unit Pengelola Keuangan (UPK). Dalam program pemberdayaan masyarakat di Palembang usaha simpan pinjam dapat memenuhi kebutuhan warga yang membutuhkan, pinjaman yang dapat diberikan oleh UPK kepada warga berkisar dari Rp. 500.000,- sampai Rp. 3.000.000,- pinjaman tersebut sangat membantu selain dapat diangsur tiap bulannya dengan jasa/bunga sebesar 1,5 %, apabila telah lewat 1 tahun, jika mengalami keterlambatan dikenakan sanksi wilayah, berbeda dengan peminjaman di renternir, dengan bunga sebesar 30%-50% dalam setahun, apabila tidak dapat melunasi dalam jangka waktu setahun, maka dikenakan bunga sebesar 30%-50% lagi. Sementara warga yang belum mendapatkan pinjaman dari Unit Pengelola Keuangan mengandalkan pekerjaan yang mereka miliki, warga lainnya mengandalkan pinjaman dari renternir dengan bunga cukup tinggi. Kelompok yang lancar dapat mengajukan kembali sementara kelompok yang menunggak tidak dapat mengajukan sebelum melunasi tunggakannya

Untuk mencapai tujuan itulah, agenda utama pemerintah kota Palembang dalam pembangunan nasional lebih menitikberatkan pada pembangunan kawasan terpencil, melalui Program Pemberdayaan Daerah Mengatasi Krisis Ekonomi (PDM-DKE), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), dan Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu- Taskin). Harapannya mampu memberdayakan dan meningkatkan kemandirian penduduk setempat dalam berwirausaha sehingga mampu menciptakan lapangan kerja sendiri demi mengurangi jumlah kemiskinan dan pengangguran di kecamatan kota Palembang.

Hal ini sesuai dengan teori kepribadian yang mengarah kepada prestasi yang dikembangkan oleh David Mc Clelland, yang mengatakan bahwa pendorong perkembangan ekonomi adalah semangat kewiraswastaan dari masyarakat. Semangat ini lebih didorong oleh hasrat yang kuat untuk berprestasi. Masyarakat yang tinggi tingkat kebutuhan berprestasinya, pada umumnya akan menghasilkan perkebang dan ekonomi yang lebih cepat. Urgensinya, memberdayakan ekonomi lokal melalui pemberdayaan industri lokal dengan memanfaatkan dana bantuan.

KESIMPULAN

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang menjadi prioritas untuk diselesaikan oleh pada setiap periode pemerintahan di Indonesia. Berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilakukan baik oleh pemerintahan yang lalu maupun yang sekarang, mulai dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sekolah gratis, dan berobat gratis di beberapa provinsi di Indonesia hingga pada pemberian berbagai skim subsidi bagi masyarakat, namun program-program tersebut belum sepenuhnya mampu mensejahterakan masyarakat miskin di Indonesia.

Kemiskinan adalah masalah bagi negara di dunia terutama pada negara yang sedang berkembang. Kemiskinan memang persoalan yang kompleks, karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi. Tetapi, berkaitan pula dengan

rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan serta ketidakberdayaannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.

Perkuat monitoring dan kajian terhadap program kemiskinan. Banyak pihak meyakini lembaga keuangan mikro sebagai suatu alat pembangunan yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan karena layanan keuangan memungkinkan orang kecil dan rumah tangga berpenghasilan rendah untuk memanfaatkan peluang ekonomi, membangun asset dan mengurangi kerentanan terhadap goncangan eksternal. Lembaga keuangan mikro menjadi alat yang cukup penting untuk mewujudkan pembangunan dalam tiga hal sekaligus, yaitu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengentaskan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, Dwi Septa, dkk. (2019). "*Dampak Zakat terhadap perubahan tipologi kemiskinan di kota Palembang*", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Hendayana, Rachmat. Dkk. (2007). *Fenomena Keuangan Mikro Dalam Persepektif Pembangunan Ekonomi Pedesaan*. Balai Besar Pengkajian dan pengembangan Teknologi Pertanian, Bogor: Jurnal Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.
- Ismawan, Bambang. (2000). *Pemberdayaan Orang Miskin, Refleksi Seorang Pegiat LSM*. Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara, Jakarta.
- Kembar Sri Budhi, Made. (2013). "*Analisis faktor-faktor yang berpengaruh Terhadap pengentasan kemiskinan di Bali: Analisis FEM Data panel*, Jurnal Ekonomi kuantitatif terapan.
- Kusuma Retno, Ely. (2017) "*Pengaruh Pendidikan dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*" Jurnal Ekonomi.
- Kuncoro, M. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan. (Isted.)*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- _____. (2003). *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Penerbit UPP-AMP YKPN. Yogyakarta.
- _____. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Erlangga, Jakarta
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi: Yogyakarta
- Mohd. Kurniawan. (2017). "*Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin (Studi kasus di Kecamatan Sungai Lilin*" Jurnal Ilmiah Ekonomi global masa kini.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Cetakan ke duapuluh empat. Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Murdiansyah, Isnan. (2014). *Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Program Gerdu-Taskin Di Kabupaten Malang)* Jurnal Wiga.

- Nasikun. (2011). *Bahan Kuliah; Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan*. Magister Administrasi Publik. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Prayitno, dkk. (1996). *Ekonomi Pembangunan*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Remi, dkk. (2002). *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- Setiyawan, Risky Dwi, dkk. 2016. *Rancang Bangun Aplikasi Untuk Pemetaan Tingkat Kemiskinan Masyarakat Berbasis Perangkat Bergerak*. Jurnal Teknik ITS.
- Solikatun, dkk. (2014). “Kemiskinan dalam pembangunan” jurnal analisis sosiologi.
- Sudomingrat, G. (2003). *Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Menanggulangi Kemiskinan Terkait dengan Kebijakan Otonomi Daerah*. Jurnal.
- Suhandi, Nazori, dkk. (2018). “Analisis Pengaruh Jumlah penduduk terhadap jumlah kemiskinan menggunakan metode regresi linier dikota Palembang” Jurnal ilmiah informatikan global.
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT Refika Aditama
- Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Pengeluaran.
- Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Pengeluaran.
- Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.
- Suryahadi, Asep dan Sumarto. (2001). “Memahami Kemiskinan Kronis dan Kemiskinan Sementara di Indonesia”. Smeru Newsletter.
- Tambunan, dkk. (2006). *Perekonomian Indonesia, Teori dan Temuan Empiris*, Cetakan II. Ghalia Indonesia, Jakarta.